

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015-2019)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

BERTI INDAH SARI

18043181/2018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

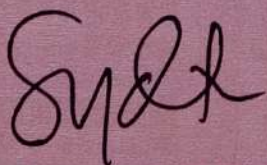
Nama : Berti Indah Sari
TM/NIM : 2018/18043181
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2021

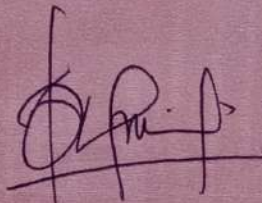
Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, S.E, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP. 19800103 200212 2 001



Halmawati, S.E., M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Berti Indah Sari

TM/NIM : 2018/18043181

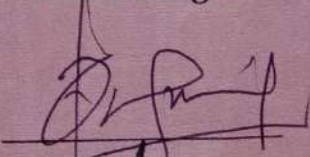
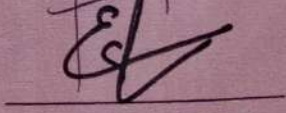
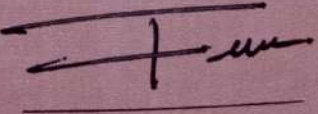
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2021

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Halmawati, S.E, M.Si	
2	Anggota	: Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak	
3	Anggota	: Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak.	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Berti Indah Sari
NIM/ Tahun Masuk : 18043181/ 2018
Tempat /Tgl Lahir : Durian Pulut-Pulut/ 07 Mei 1996
Jurusan/ Fakultas : Akuntansi/Ekonomi
Alamat : Durian Pulut-Pulut, Kec. V Koto Kampung Dalam
No. Hp : 082390164660
Judul Skripsi : Pengaruh PAD, DAU dan Belanja Daerah Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1.Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di perguruan tinggi lainnya.
- 2.Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
- 3.Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali secara ekspelisis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4.Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2021

Yang menyatakan



Berti Indah Sari
NIM. 18043181

ABSTRAK

Berti Indah Sari (18043181) : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat”

Pembimbing : Halmawati, S.E, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dengan 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, DAU dan Belanja Daerah secara bersama berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori dan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa PAD, DAU dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Belanja Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun materi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Halmawati, SE, M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi diwaktu yang tepat.
4. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak. dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M. Sc, Ak. selaku dosen penelaah dan penguji yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi Akuntansi FE UNP yang telah membimbing, berbagi ilmu pengetahuan dan membantu urusan akademik kepada penulis selama perkuliahan.

6. Kedua orang tua Ayah dan Amak, Kak Eka dan Kak Adek. Serta seluruh keluarga besar yang telah menjadi motivasi terbesar bagi penulis dan memberikan dukungan moril maupun materil yang tidak dapat diungkapkan dengan untaian kata-kata.
7. My Bucin yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa, yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi untuk terus berjuang.
8. Sahabat terkece, Narita, Nola Marka, Meisya Emilia Iskandar, Dini Fadillah, Annisa Zahwa Fuad, dan Asmaul Husna yang telah menjadi tempat berbagi senyum, canda, tawa, dan tangis selama ini.
9. My best friend Fitri Yeni yang telah bersedia disusahkan dalam segala kondisi, kawan dakek dari SMK sampai satu kos waktu DIII walau terlihat cuek tapi sangat baik hati.
10. Rekan-rekan mahasiswa Transfer Akuntansi 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang tidak disebutkan diatas, yang telah ikut membantu dan menyelesaikan kuliah dan skripsi, memberikan saran, nasihat, do'a, dan semangatnya kepada penulis.

Dengan keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam analisis dan pembahasan. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga bermanfaat khususnya bagi diri pribadi, Almamater, Lembaga dan orang banyak pada umumnya

Padang, Januari 2021

Berti Indah Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	11
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
3. Pendapatan Asli Daerah.....	15
4. Dana Alokasi Umum	16
5. Belanja Daerah	17
B. Penelitian Terdahulu.....	18
C. Hubungan Antar Variabel.....	21
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	21
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	22
3. Belanja Daerah dengan Kinerja Keuangan	

Pemerintah Daerah	23
D. Kerangka Konseptual.....	24
E. Hipotesis.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Populasi dan Sampel.....	26
C. Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	26
D. Variabel Penelitian	27
E. Pengukuran Variabel	27
F. Teknik Analisis Data	28
1. Analisis Statistik Deskriptif	28
2. Uji Asumsi Klasik	29
a. Uji Normalitas	29
b. Uji Multikolinearitas	29
c. Uji Heterokedastisitas	29
d. Uji Autokorelasi	30
3. Analisis Regresi Linear Berganda	30
4. Pengujian Hipotesis	31
a. Uji F (<i>F-Test</i>).....	31
b. Uji Hipotesis (<i>t-Test</i>).....	31
5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	31
G. Defenisi Operasional	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
B. Deskripsi Variabel Penelitian	34
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	35
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	38

3. Dana Alokasi Umum (DAU)	40
4. Belanja Daerah	42
C. Statistik Deskriptif.....	44
D. Teknik Analisis Data	45
1. Uji Asumsi Klasik	45
a. Uji Normalitas.....	45
b. Uji Multikolinearitas.....	47
c. Uji Heterokedastisitas.....	48
d. Uji Autokorelasi.....	49
2. Analisis Regresi Linear Berganda	50
3. Pengujian Hipotesis	51
a. Uji F (<i>F-Test</i>).....	51
b. Uji Hipotesis (<i>t-Test</i>).....	53
4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
E. Pembahasan.....	55
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	55
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	56
3. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
C. Keterbatasan Penelitian	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	24
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2017	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. Efisiensi Keuangan Daerah.....	36
Tabel 4. Rasio Efisiensi Kab/Kota Sumatera Barat Tahun 2015-2019.....	36
Tabel 5. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019	38
Tabel 6. Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2015-2019.....	41
Tabel 7. Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015-2019.....	43
Tabel 8. Statistik Deskriptif	45
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas	47
Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 12. Hasil Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 13. Hasil Regresi Linear Berganda	50
Tabel 14. Hasil Uji F.....	52
Tabel 15. Hasil Uji T	53
Tabel 16. Hasil Uji Koefisien Determinasi	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 2. Hasil Pengolahan Data

Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah telah diberi kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan segala potensi yang ada di daerah dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Untuk melihat sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, kita perlu melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam memajukan daerah dan mengelola keuangan daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan PP 12 tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah program atau kegiatan yang telah dicapai pemerintah daerah sehubungan dengan penggunaan anggaran terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Fahmi (2012:2), “Kinerja keuangan adalah ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan yang berlaku dengan baik dan benar”. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dampak dari kinerja keuangan pemerintah itu sendiri yaitu untuk melihat sejauh mana pemerintah telah berhasil melaksanakan program atau kegiatan yang telah dicapai pemerintah sehubungan dengan penggunaan anggaran terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan daerah. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah (Ajeng, 2019).

Pada penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktifitas, dan output adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktifitas, dan kebijakan. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam menggunakan belanja daerahnya untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini membuat rasio efisiensi menjadi penting, karena peningkatan rasio efisiensi berarti peningkatan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang dihasilkan pemerintah daerah diharapkan dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya dengan menggali potensi daerah yang ada. Selain itu, PAD dapat mewujudkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat.

PAD sendiri merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Abdullah, 2015). Selain PAD, penerimaan daerah juga berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan. Dana perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Julitawati, 2012).

Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU digunakan kepala daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam prakteknya DAU banyak terserap di belanja pegawai yang menjadi hal krusial di daerah. Karena urgensi dari belanja tidak sejalan dengan pembangunan masyarakat, kebutuhan dan tuntutan yang ada di masyarakat. Akibatnya, fungsi yang dijalankan pemerintah daerah tidak sesuai dengan kinerjanya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 belanja daerah terdiri dari; belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alokasi belanja daerah yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau daerah. Disamping itu, belanja merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya belanja daerah pemerintah daerah dapat mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan meningkatnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2017 (Ribuan
Rupiah)

Alokasi Anggaran	2015		2016		2017 *)	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pendapatan	17 668 412 091,52	100,00	18 812 959 845,93	100,00	19 622 175 672,10	100,00
1 Pendapatan Asli Daerah	1 576 555 593,60	8,92	1 683 226 171,34	8,95	1 922 479 948	9,80
2 Dana Perimbangan	12 732 290 100,24	72,06	15 407 122 288,49	81,90	15 736 035 237	80,20

Lain-lain Pendapatan						
3 yang Sah	3 359 566 397,67	19,01	1 722 611 386,10	9,16	1 963 660 487	10,01
Belanja						
B Daerah	17 248 808 877,44	100,00	19 324 813 751,07	100,00	21 126 801 316,41	100,00
1 Belanja Tidak Langsung	9 770 394 444,83	56,64	10 702 837 811,34	55,38	10 574 554 692,09	50,05
1.1 Belanja Pegawai	8 698 158 840,04	89,03	9 121 106 799,32	85,22	8 495 994 848,72	80,34
Belanja Bunga,						
1.2 Subsidi, Hibah	327 703 560,61	3,35	238 027 608,41	2,22	204 319 120,57	1,93
Belanja Bantuan						
1.3 Sosial	10 222 926,04	0,10	9 902 264,40	0,09	14 075 612,97	0,13
Belanja Bagi						
1.4 Hasil & Bantuan Keuangan	720 922 363,44	7,38	1 318 914 651,33	12,32	1 801 863 742,80	17,04
Belanja Tidak						
1.5 Terduga	13 386 754,70	0,14	14 886 487,88	0,14	58 301 367,03	0,55
2 Belanja Langsung	7 478 414 432,61	43,36	8 621 975 939,73	44,62	10 552 246 624,32	49,95
2.1 Belanja Pegawai	567 065 393,59	7,58	574 059 128,89	6,66	717 630 735,08	6,80
Belanja Barang						
2.2 dan Jasa	3 468 930 168,43	46,39	3 832 412 534,35	44,45	4 620 650 972,85	43,79
2.3 Belanja Modal	3 442 418 870,60	46,03	4 215 504 276,48	48,89	5 213 964 916,39	49,41

Sumber: Pengolahan dokumen K-2 Kabupaten/Kota (BPS Provinsi Sumatera Barat)

Dilihat dari total realisasi pendapatan di seluruh daerah tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Barat tercatat sebesar 18.812,96 miliar rupiah,

meningkat 6,48 persen dibandingkan tahun 2015. Sebagian besar pendapatan kabupaten/kota bersumber dari dana perimbangan 15.407,12 milyar rupiah (81,90 persen), diikuti lain-lain pendapatan daerah yang sah 1.722,61 milyar rupiah (9,16 persen).

Sementara, penerimaan daerah dari PAD masih sangat rendah, yaitu 1.683,23 miliar rupiah atau sekitar 8,95 persen dari total pendapatan. Penerimaan PAD seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan utama di daerah tersebut, karena pendapatan ini digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Berdasarkan hal tersebut, kinerja keuangan pemerintah menjadi sangat rendah karena rendahnya kontribusi dari PAD tersebut.

Berdasarkan data diatas, umumnya pendapatan kabupaten/kota sebagian besar berasal dari dana perimbangan, terutama diperoleh dari Dana Alokasi Umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa, masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan juga menunjukkan rendahnya tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu, pada sisi pengeluaran sebagian besar belanja pemerintah kabupaten/kota lebih banyak terserap untuk kebutuhan belanja tidak langsung dibandingkan untuk kebutuhan belanja langsung. Pada tahun 2016 Pemerintah kabupaten/kota telah mengeluarkan dana sebesar 19.324,81 miliar rupiah untuk belanja daerah, dengan realisasi sebesar 55,38 persen untuk belanja tidak langsung dan 44,62 persen untuk belanja langsung. Pemanfaatan belanja langsung senilai 8.621,97 miliar rupiah sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal sebesar 4.215,50 miliar rupiah (48,89 persen), dan untuk belanja barang dan jasa sebesar 3.832,41 miliar rupiah (44,45 persen). Belanja pegawai hanya sebesar 574,06 miliar rupiah (6,66 persen), sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Disamping itu, belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagian besar dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung. Dimana berdasarkan Permendagri nomor 25 tahun 2009 belanja langsung diupayakan lebih besar dari belanja tidak langsung. Sementara data diatas menunjukkan bahwa belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dilihat pada tahun 2018 data laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari BPK RI menunjukkan bahwa, hampir seluruh daerah kabupaten/kota di provinsi Sumbar terjadi penurunan terhadap PAD. Terutama di daerah kabupaten Padang Pariaman, kabupaten Solok, kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten Agam, dan kabupaten Pasaman Barat yang mengalami penurunan PAD terendah. Akibatnya, kinerja keuangan pemerintah menjadi sangat rendah karena pemerintah kurang menggali sumber dan potensi daerah dengan baik. Fenomena yang diperoleh dari BPK RI perwakilan provinsi Sumatera Barat, bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih memiliki PAD yang relatif kecil. Rata-rata masih berada dibawah sepuluh persen dari total APBD masing-masing Daerah. Sebagian besar kabupaten lainnya di Sumatera Barat memiliki PAD yang berkisar lima persen dan sepuluh persen PAD yang dimiliki oleh kota. Menurut Wakil Ketua DPRD provinsi Sumatera Barat, Arkadius Dt. Intan Bano (2018) menyatakan, “Sebenarnya jumlah ini masih terbilang kecil. Kami berharap masing-masing daerah kabupaten dan kota bisa mencari cara untuk meningkatkan PAD. Sebenarnya rata-rata nasional PAD masing-masing daerah ditargetkan sepuluh persen”.

Sementara, penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 masih sangat rendah, yaitu 2.097,85 miliar rupiah atau sekitar 9,88 persen dari total pendapatan. Sehingga, pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah seharusnya menjadi sumber utama didaerah tersebut, karena pendapatan ini dapat digali dari potensi daerah.

Kondisi ini mencerminkan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Kemudian, pada belanja daerah sebagian besar terserap pada belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar 53,77 persen dan 46,23 persen belanja langsung di tahun 2019. Sebaiknya, belanja langsung harus lebih besar daripada belanja tidak langsung. Dilihat dari sisi pendapatan dan belanja dalam lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah maupun dalam realisasi belanja daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah (2015) yang mengatakan bahwa secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah saja yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Refi (2019) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Armaja (2015) Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Reny (2016) bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama dalam menganalisis laporan keuangan pada anggaran PAD, DAU dan belanja daerah sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan Pengaruh PAD, DAU dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan disebut sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* (Siagian, 2011). *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas demi kepentingan *principal* termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Menurut Halim dan Abdullah (2009) teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Kemudian dalam penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih *principal* mempekerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Berdasarkan hal tersebut seorang *agent* wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh *principal* kepadanya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah gambaran suatu hubungan antara kedua belah pihak di mana salah satunya berperan sebagai pemberi wewenang sedangkan pihak lainnya berperan sebagai penerima yang bertugas untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepentingan yang telah dilimpahkan. Dalam organisasi sektor publik teori keagenan sudah dilaksanakan. Diakui atau tidak di dalam pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Khususnya antara hubungan eksekutif dan legislatif yang pada gilirannya dengan teori keagenan (Halim dan Abdullah, 2006).

Mardiasmo (2012) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban,, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan pengertian akuntabilitas menurut Mahmudi (2010:23) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumberdaya melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau (*principal*).

Dalam teori keagenan terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi salah satu diantaranya adalah terjadinya asimetri informasi yang merupakan suatu kondisi dimana pemerintah sebagai agen lebih banyak mengetahui kondisi internal perusahaan atau instansi dibandingkan pihak *principle* atau masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah berupa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang kemudian laporan keuangan ini digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan daerah. Asimetri informasi dapat terjadi apabila pemerintah daerah tidak menyajikan laporan keuangannya secara lengkap dan andal. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh agent serta dapat merugikan pihak prinsipal. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan penilaian atas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara berkala sebagai bentuk pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2013), “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi pemerintah daerah”. Kinerja Keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012).

Pendapat lainnya mengatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang ukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro, 2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik.

Menurut Halim (2012), “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku”. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah menggunakan rasio desentralisasi fiskal yaitu perbandingan antara total PAD dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2016). Menurut Mahmudi (2016), analisis rasio keuangan antara lain sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan bagaimana kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/pemerintah provinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka dari rasio ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang telah ditargetkan

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila

ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2012), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa PAD terdiri dari:

- 1) Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui Perda (Peraturan Daerah). Jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

dan (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota. Pajak ini terdiri atas (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan (7) pajak parkir.

- 2) Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri atas (a) retribusi jasa umum, (b) retribusi jasa usaha, (c) retribusi perizinan tertentu.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan yang meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas penyertaan modal/investasi.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU adalah bagian dari dana perimbangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diberikan setiap tahunnya yang diambil dari dana APBN, dimana besarnya dana yang diberikan tersebut ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (UU No. 33/2004, Pasal 27). Sedangkan berdasarkan pendekatan kesenjangan fiskal, besarnya DAU yang diterima oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia didasarkan pada ketentuan berikut ini (Halim, 2007):

- 1) Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan sebesar 10% dan 90% dari DAU sebagaimana tersebut diatas.
- 3) Dana alokasi umum untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Dalam LRA, penerimaan DAU merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan).

5. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Belanja daerah yang digunakan untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Setiap daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan standar teknis yang berlaku. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran (Erlina, 2015). Adapun klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari; belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah (2015) yang mengatakan bahwa secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah saja yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Refi (2019) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu dkk (2019) tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Yuliasti dkk (2019) tentang ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”. Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulia dkk (2016) tentang “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh”. Menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Namun hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya penelitian dari Armaja dkk (2015) tentang “Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan”. Menunjukkan hasil bahwa, Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Tahun	Judul	Hasil
1	Abdullah dkk/2015	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan	Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten

			dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013.
2	Ajeng A/2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017.
3	Refi S. dkk/2018	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal, Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2016	PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau periode 2011-2016.
4	Ni Putu dkk/2018	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.
5	Yuliasti dkk/2018	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Halmahera Barat.
6	Mulia A dkk/2016	Pengaruh Belanja Modal,	Pendapatan Asli Daerah secara

		Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh	simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Namun hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
7	Armaja dkk/2015	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh

C. Hubungan Antar Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Disamping itu, PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dalam otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh sebab itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya sumber dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala

kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PAD yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) yang mengungkapkan bahwa, tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Yuliasti dkk (2019) juga menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana yang berasal dari dana perimbangan. Julitawati (2012) menguji pengaruh DAU sebagai bagian dari dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Rukmana (2013) juga menguji pengaruh DAU sebagai bagian dari dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refi dkk (2019) yang menyatakan bahwa, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2011-2016. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Belanja Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

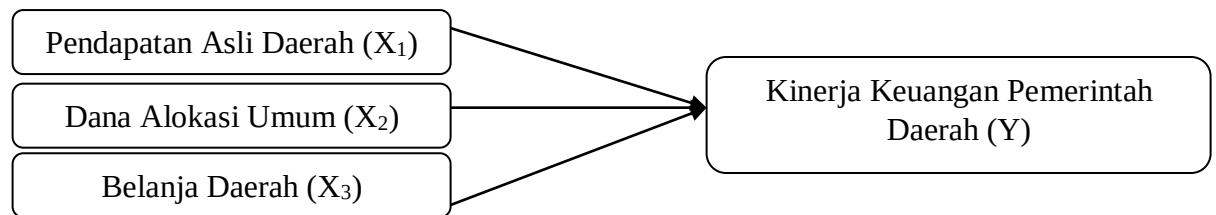
Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan Ardy (2015) menunjukkan bahwa, belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reny (2016) menyatakan bahwa, belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian, dapat ditunjukkan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1: Kerangka Konseptual

Gambar diatas menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah sebagai X_1 , Dana Alokasi Umum sebagai X_2 dan Belanja Daerah sebagai X_3 ketiga variable merupakan variabel independen terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen.

E. Hipotesis

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

H3 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian pada hipotesis yang telah dilakukan terdapat bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019. Sedangkan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. .

Hasil pengujian pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah sesuai dengan teori dan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variabel lain dalam penelitian karena, selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah yang telah digunakan dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa variabel lain yang bisa ditambahkan
 - b. Memperluas periode pengamatan agar lebih maksimal dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

- c. Memperluas objek penelitian dengan menambah provinsi lain sehingga akan memperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan untuk kinerja keuangan pemerintah daerah Indonesia.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan daerahnya karena jika dilihat dari rasio efesiensi hampir seluruh daerah kinerjanya kurang efisien. Hal ini disebabkan lebih banyaknya pengeluaran daripada penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat harus memberikan kontrol serta kritik dan saran kepada pemerintah dalam kinerja keuangan pemerintah. Sehingga, kebijakan yang dibuat pemerintah akan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya terutama di daerah.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah.
2. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah hanya menggunakan satu jenis rasio yaitu, rasio efesiensi.
3. Adanya keterbatasan penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi berupa data sekunder dan tidak menggunakan data primer.

4. Penelitian ini terbatas pada kabupaten/kota di Sumatera Barat, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Dri, A. S., & Febriansyah, F. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41-67.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(3).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2).
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat 2013-2017. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 4(3), 32-41.
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168-181.
- BPS. (2016), Pedoman Pencacahan Survei Statistik Keuangan Daerah 2016, Jakarta, BPS.
- BPS. (2017), Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2015-2016, Padang, BPS.
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 183-199.
- Erlina, O. S. Rambe, dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Fahmi, I. (2012). Analisis kinerja keuangan. Bandung: Alfabeta, 3.

Garini, A. (2015). *Pengaruh belanja daerah, temuan audit dan size terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG).

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Penerbit Salemba Empat.

Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64.

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah/>

<https://padang.bpk.go.id/>

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.

Julitawati, E. Darwanis, dan Jalaluddin, (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, 1, 15-29.

Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5).

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi kedua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2016.) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. *Yogyakarta: BPFE*.

Mardiasmo. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI.

Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Indonesia, R. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indonesia, R. (2009). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Indonesia, R. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rukmana, W. V. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*.

Retnowati, R. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Siagian, S. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Susanti, R., & Ratih, A. E. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL, TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DIPROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2011-2016. *Jurnal Revi. Tanjungpinang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maritim Raja Ali Haji(UMRAH)*.

Ujiyantho, M. A., & Pramuka, B. A. (2007). Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 10(6),1-26.